

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Sampah**

Bank sampah bisa dikatakan sebagai tempat transaksi untuk meningkatkan pendapatan. Menurut Bambang Suwerda, bank sampah adalah tempat kegiatan pelayanan bagi penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Sucipto, yaitu pengelolaan sampah pemukiman dengan menerapkan strategi 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) kemudian masyarakat menyetorkan sampah tersebut ke lembaga yang dibentuk dan disepakati bersama. Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bank sampah merupakan suatu sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan sistem mekanisme perbankan di lingkungan masyarakat.

Bank sampah merupakan konsep yang sederhana dan sangat mudah dilakukan atau diterapkan di berbagai daerah dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Bank sampah mengubah paradigma sampah yang selama ini dipandang kotor dan menjijikkan menjadi sesuatu yang bersih. Konsep ini akan muncul jika disatukan dalam satu kata dengan Bank, menjadi bank sampah. Banyak orang awam melihat kata bank yang merupakan tempat yang bersih dan bank sampah akan meningkatkan nilai sampah dari klaster kotor menjadi klaster bersih. Bank sampah memberikan manfaat yaitu mendidik anak untuk membiasakan menabung, walaupun berupa sampah, lingkungan rumah menjadi

---

<sup>1</sup> Bambang Suwerda, *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*, (Yogyakarta: PustakaRihama, 2012), 22.

bersih dari sampah, mengurangi pencemaran lingkungan terutama pencemaran udara atau pencemaran akibat pembakaran sampah plastik, memudahkan masyarakat mengelola sampah kertas, plastik, kaleng/botol, dan menguntungkan pihak ketiga (rosok) karena sampahnya sudah dipilah.<sup>2</sup>

Peran bank sampah adalah dalam teori pertukaran, teorinya adalah penghargaan dan hukuman. Bank sampah tidak bisa menghukum masyarakat, jadi bank sampah menggunakan sistem penghargaan. Proses pengelolaan sampah dengan penghematan yang bernilai uang atau rupiah mengubah paradigma masyarakat tentang sampah.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perlu adanya reward bukan punishment yang ditetapkan oleh pengelola bank sampah untuk membawa keberhasilan bank sampah. Dalam artikel Sustaining Partnership, bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dengan memberikan imbalan uang kepada mereka yang berhasil memilah dan menyimpan sampah. Besarnya uang tergantung jenis sampah.<sup>4</sup>

Bank sampah memiliki tabungan rupiah, yaitu tabungan untuk individu masyarakat dengan membawa sampahnya ke bank sampah dan menukarkannya dengan uang yang dimasukkan dalam buku tabungan. Penghematan lingkungan yaitu ikut serta berperannya perusahaan atau pelaku usaha untuk melestarikan lingkungan, tabungan ini biasanya tidak diuangkan tetapi dipublikasikan ke media yang lebih luas seperti perusahaan atau pelaku usaha yang bekerjasama dalam

---

<sup>2</sup> Bambang Suwerda, *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*, (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012), 68-69.

<sup>3</sup> Ni Made Via P. dan I Nengah Kartika, "Analisis Pengaruh Program Bank Sampah Terhadap Pendapatan Nasabah Bank Sampah di Kota Denpasar", *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*, Vol. 7 No. 6, 2016, 1261.

<sup>4</sup> Ruski, "Pengaruh Program Bank Sampah Terhadap Tingkat Pendapatan Keluarga Nasabah Bank Sampah Lavender (BSL) di Desa Mlajah Bangkalan", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2 No. 1, 2014, 129.

pengelolaan bank sampah untuk kebersihan lingkungan, maka akan dibuat piagam diberikan, yaitu piagam BUMI setiap hari lingkungan Indonesia.<sup>5</sup>

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat itu sendiri juga berpartisipasi.<sup>6</sup> Suatu upaya hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat jika kelompok masyarakat atau komunitas tersebut menjadi agen pembangunan atau disebut juga sebagai subjek. Di sini subjek adalah kekuatan pendorong dan bukan penerima manfaat. Artinya masyarakat harus menjadi aktor utama dalam hal pembangunan atau pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat, terutama kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka memiliki kebebasan, dalam arti tidak hanya bebas dari kebodohan, bebas dari rasa sakit, mencapai sumber daya produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapat mereka dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>7</sup>

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan proses sekaligus tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah rangkaian kegiatan untuk

---

<sup>5</sup> Ibid., 1269.

<sup>6</sup> <https://id.m.wikipedia.org/pemberdayaan-masyarakat>. Diakses pada tanggal 02 Februari 2021 pukul 22.00 WIB.

<sup>7</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2005), 58.

memperkuat daya atau pemberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai suatu tujuan, pemberdayaan mengacu pada kondisi atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial, yaitu orang-orang yang berdaya, memiliki daya atau memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>8</sup>

Pemberdayaan sebagai suatu proses tentunya dilakukan secara bertahap, dan dapat dilaksanakan secara instan. Tahapan dalam pemberdayaan adalah:<sup>9</sup>

1. Tahap pertama adalah kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar akan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas diri.
2. Tahap kedua adalah transformasi atau peningkatan kemampuan masyarakat mulai dari pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sehingga masyarakat dapat memiliki kemampuan dasar sehingga dapat berperan serta dalam suatu kegiatan pembangunan.
3. Tahap ketiga adalah peningkatan kemampuan berpikir atau intelektual sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif yang mengarah pada kemandirian.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan), menciptakan peluang usaha sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi kawasan yang pada gilirannya dapat menciptakan kelembagaan dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian bermuara pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

---

<sup>8</sup> Ibid., 60.

<sup>9</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 83.

Ekonomi Islam merupakan salah satu ilmu yang multi dimensional/interdisipliner, komprehensif, dan saling terintegrasi, termasuk ilmu-ilmu keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits, serta ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ini pengetahuan manusia dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan sumber daya untuk mencapai falah (kebahagiaan).<sup>10</sup>

### **C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

#### **1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/ kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.<sup>11</sup> Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>12</sup>

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

---

<sup>10</sup> Veithal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 91.

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 242.

<sup>12</sup> Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam [wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah](https://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah) diakses tgl. 5 Juni 2021

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.<sup>13</sup>

## 2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi
- d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk

---

<sup>13</sup> Ibid.

membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).<sup>14</sup>

### 3. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* yang telah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 4.

Dalam kondisi ini mengetengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid., 38.